



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perlindungan Wilayah Perairan Natuna dan Klaim Pemerintah China Tahun 2019-2024

Jedidiah Nehemia Marsono<sup>1</sup>, Novriest Umbu Walangara Nau<sup>2</sup>, Roberto Octavianus Cornelis Seba<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, [jedidiahnehemia980@gmail.com](mailto:jedidiahnehemia980@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, [novriest.umbu@uksw.edu](mailto:novriest.umbu@uksw.edu)

<sup>3</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, [robert.seba@uksw.edu](mailto:robert.seba@uksw.edu)

Corresponding Author: [jedidiahnehemia980@gmail.com](mailto:jedidiahnehemia980@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Indonesia is a country with extensive maritime territories, earning it the designation of a maritime nation with a vast expanse of territorial waters. Indonesia's territorial waters include the territorial sea, the continental shelf boundary, and the Exclusive Economic Zone. One area of Indonesian waters located near the South China Sea and falling within the Exclusive Economic Zone is the Natuna waters, situated in the Riau Islands Province. China claims a large portion of the South China Sea, including the Natuna waters, through its "Nine-Dash Line" claim. This research aims to analyze the roles and strategies that the Indonesian government needs to implement to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia's territory within the Natuna waters. Using a qualitative research method, this study analyzes Indonesia's role and strategy in responding to the conflict arising from China's claim over the Natuna waters. The findings indicate that Indonesia employs diplomacy, defense, and security strategies to safeguard and resolve conflicts related to the Natuna waters. The study concludes that, of the two strategies employed to resolve the conflict, the most effective is to strengthen defense and security in the Natuna waters.*

**Keywords:** *South China Sea, China, Natuna, Diplomacy, Defense, Security*

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang banyak, hingga Indonesia mendapatkan sebutan sebagai negara maritim, yang memiliki wilayah teritorial perairan yang sangat luas. Wilayah teritorial Indonesia meliputi laut teritorial, batas landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Terdapat wilayah perairan Indonesia yang berada dekat dengan Laut China Selatan dan masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu perairan Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna, yang disebut 'Sembilan Garis Putus-putus' atau "Nine-Dash Line". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah Perairan Natuna. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menganalisis peran dan strategi Indonesia dalam merespons konflik yang terjadi akibat klaim China terhadap wilayah perairan Natuna. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan strategi diplomasi, pertahanan dan keamanan dalam menjaga dan menyelesaikan konflik terkait perairan Natuna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dapat digunakan dari dua strategi yang dipakai untuk menyelesaikan konflik adalah dengan memperketat pertahanan dan keamanan di perairan Natuna.

**Kata Kunci:** Laut China Selatan, China, Natuna, Diplomasi, Pertahanan dan Keamanan

## PENDAHULUAN

Wilayah perairan merupakan bagian integral dari kedaulatan suatu negara yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Laut tidak hanya menjadi jalur transportasi penting antar negara, tetapi juga menjadi sumber utama bahan makanan, energi, dan hasil tambang, serta lokasi kegiatan perdagangan dan pertahanan. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, wilayah laut memiliki arti yang lebih dari sekadar perairan biasa, ia adalah urat nadi yang menghubungkan antar pulau dan bagian penting dari identitas nasional sebagai negara maritim.

Indonesia memiliki luas wilayah perairan yang sangat besar, yang meliputi laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Laut teritorial merupakan perairan sejauh 12 mil laut dari garis dasar, sedangkan landas kontinen dan ZEE masing-masing mencakup hingga 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Dalam wilayah ZEE, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, wilayah-wilayah perairan Indonesia mulai menghadapi berbagai ancaman, salah satunya datang dari sengketa klaim wilayah di Laut China Selatan.

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang terdampak langsung adalah perairan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Terletak di bagian selatan Laut China Selatan, wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas, tetapi juga berada di jalur pelayaran internasional yang sangat strategis. Namun demikian, klaim sepihak pemerintah China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan melalui konsep “Nine-Dash Line” telah menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan China, terutama karena sebagian klaim tersebut tumpang tindih dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Meskipun Indonesia bukan pihak dalam klaim sengketa atas Kepulauan Spratly atau Paracel, klaim China telah secara langsung menyentuh wilayah yurisdiksi nasional Indonesia dan melanggar ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Tindakan koersif dari pihak China, seperti kehadiran kapal-kapal nelayan dan coast guard di wilayah ZEE Indonesia, telah mengancam kedaulatan negara dan menciptakan ketidakamanan bagi warga Indonesia, terutama nelayan Natuna yang menggantungkan hidup dari laut.

Untuk merespons tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari pendekatan diplomatik hingga penguatan pertahanan di wilayah Natuna. Pendekatan diplomasi dilakukan melalui nota protes, pelibatan forum internasional, peluncuran peta baru NKRI, serta kerja sama pertahanan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Namun, hingga saat ini, klaim China masih terus berlanjut dan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik ini bukan hal yang mudah dicapai.

Dengan mempertimbangkan pentingnya perairan Natuna bagi kedaulatan, ekonomi, dan keamanan nasional, serta meningkatnya tensi geopolitik di kawasan, maka penting untuk menganalisis bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak China dan menjaga keutuhan wilayah lautnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam

strategi serta peran pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik perairan Natuna pada periode 2019–2024, serta menilai efektivitas pendekatan yang telah dilakukan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Suryono, merupakan penelitian yang dirancang untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dengan pendekatan kuantitatif (A, 2023) sedangkan jenis penelitian yang dipergunakan adalah yang mampu menjelaskan peran dan strategi Indonesia dalam menjaga keutuhan perairan Natuna atas kasus klaim perairan Natuna dari Laut China Selatan, yaitu deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

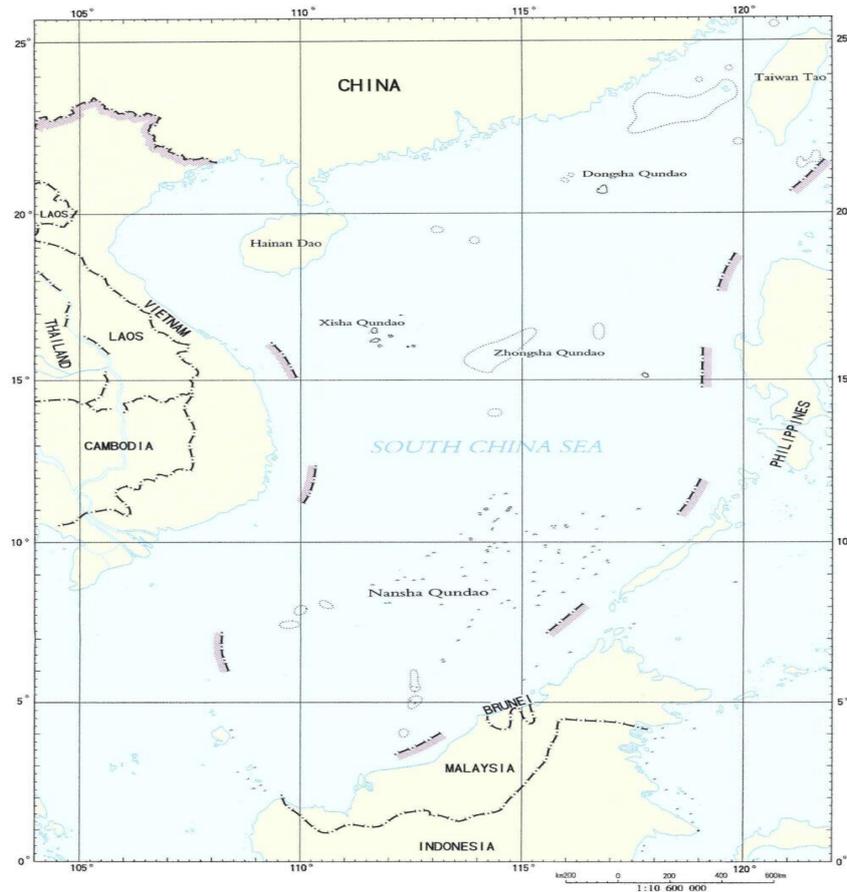
### **Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Konflik Wilayah Perairan Natuna terhadap Klaim Pemerintah China (2019–2024)**

#### **1. Gambaran Umum Konflik Wilayah Perairan Natuna**

Konflik di Laut China Selatan merupakan isu geopolitik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus memanas akibat klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep “Nine-Dash Line” (sembilan garis putus-putus). Klaim ini mencakup hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk kawasan yang secara hukum berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa klaim historis China tidak memiliki dasar hukum dalam konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982), Tiongkok tetap menolak hasil putusan tersebut dan terus memperkuat kehadirannya di kawasan.

Klaim ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memicu ketegangan nyata di lapangan. Beberapa insiden seperti masuknya kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China ke wilayah ZEE negara-negara lain, termasuk Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara, menjadi bukti nyata eskalasi konflik. Tiongkok berdalih bahwa mereka memiliki hak historis atas wilayah tersebut, sebuah narasi yang tidak diakui secara hukum internasional. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam bahkan telah menghadapi intimidasi langsung dari kapal-kapal militer China di perairan yang disengketakan.

Dalam konteks regional, respons ASEAN terhadap konflik ini cenderung tidak seragam. Negara-negara seperti Kamboja dan Laos yang memiliki kedekatan ekonomi dengan China memilih untuk bersikap netral atau mendukung narasi damai. Hal ini menghambat upaya ASEAN untuk mengambil posisi kolektif yang tegas dalam menghadapi klaim China. Sementara itu, negara-negara lain seperti Vietnam dan Filipina terus mendesak adanya kesepakatan yang mengikat secara hukum terkait *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan untuk menghindari potensi konflik bersenjata.



**Gambar 3.1**  
**Nine dash line South China Sea**  
Sumber: (Caruana, 2023)

Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim dalam konflik Spratly atau Paracel, tetap terdampak langsung karena Laut Natuna Utara termasuk dalam wilayah yang diklaim China. Pemerintah Indonesia menolak keras klaim tersebut dan menegaskan bahwa wilayah tersebut secara sah merupakan bagian dari ZEE Indonesia sesuai dengan UNCLOS. Ketegasan ini diwujudkan dalam berbagai langkah strategis, antara lain melalui penguatan diplomasi bilateral dan multilateral, pembangunan infrastruktur pertahanan di Natuna, peningkatan patroli keamanan laut, serta kerja sama militer dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Diplomasi Indonesia terhadap China dilakukan dengan pendekatan seimbang, menjaga kepentingan nasional sekaligus meminimalisasi risiko konflik terbuka. Dalam ranah bilateral, Indonesia dan China menyepakati sejumlah kerja sama maritim untuk meredakan ketegangan, salah satunya melalui pernyataan bersama (Joint Statement) yang fokus pada penyelesaian damai dan kerja sama ekonomi. Di tingkat multilateral, Indonesia berperan aktif dalam mendorong ASEAN agar memiliki sikap yang lebih solid dalam menyikapi ancaman terhadap kedaulatan maritim di kawasan. Indonesia juga menempatkan isu Laut Natuna dalam agenda kerja sama regional seperti East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum.

Selain diplomasi, Indonesia memperkuat pertahanan dengan menempatkan pangkalan militer TNI di Natuna, meningkatkan armada TNI AL, serta memperkuat sinergi dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Pelatihan militer bersama dengan negara lain juga rutin dilakukan untuk meningkatkan kapasitas respons terhadap ancaman di wilayah maritim. Pendekatan ini mencerminkan strategi *hedging*, yakni kombinasi

diplomasi damai dan kesiapsiagaan militer untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan.

Wilayah Natuna memiliki nilai strategis yang tinggi. Selain kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perikanan, wilayah ini juga berada di jalur pelayaran internasional yang padat. Ketertarikan negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia memperlihatkan bahwa Laut Natuna kini menjadi bagian dari percaturan geopolitik Indo-Pasifik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan pentingnya posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan.

Secara keseluruhan, konflik Laut China Selatan, khususnya yang berkaitan dengan klaim atas Laut Natuna Utara, menuntut Indonesia untuk memainkan peran strategis yang seimbang. Melalui kombinasi diplomasi aktif dan penguatan militer, Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatannya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim yang dihormati di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Tahun & Bulan	Insiden	Aktor Terlibat	Tindakan/Respons Indonesia	Implikasi	Sumber
Desember 2019	63 kapal nelayan China + Coast Guard memasuki ZEE Natuna	China	Mengusir kapal dan protes diplomatik	Memunculkan ketegangan besar, sorotan internasional atas klaim China	Fathiyah Wardah (VOA Indonesia, Desember 2019)
Januari 2020	Peningkatan aktivitas kapal asing di ZEE Natuna	China	Mengerahkan 600 tentara, 8 kapal perang, jet tempur, pesawat	Penguatan militer dan komitmen pertahanan wilayah	(Tempo, Januari 2020), Danu Damarjati (Detik News, Januari 2020)
Okt–Nov 2024	CCG 5402 ganggu survei seismik Pertamina East Natuna	China	Bakamla & TNI AL lakukan patroli dan mengusir kapal	Sorotan pada pentingnya tata kelola keamanan maritim	(CNN Indonesia, Oktober 2024)

## 2. Posisi Hukum Indonesia dan Dasar Klaim Wilayah

Wilayah perairan Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, merupakan salah satu kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki nilai penting dari segi ekonomi, pertahanan, serta navigasi internasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis dasar, termasuk wilayah perairan Natuna. Namun, klaim sepihak dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah Laut China Selatan melalui peta “Nine-Dash Line” telah menimbulkan sengketa yang berkepanjangan,

termasuk tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016 telah menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional, China tetap bersikeras mempertahankan posisinya.

Sejak tahun 2019, ketegangan meningkat secara signifikan ketika kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai China secara berulang memasuki perairan Natuna yang merupakan bagian dari yurisdiksi Indonesia. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan dan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai respons, Indonesia mengambil langkah strategis, termasuk mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah China, memperkuat kehadiran militer di kawasan Natuna, serta meningkatkan patroli keamanan laut oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Selain itu, Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan kedaulatan dengan melakukan kunjungan langsung ke Natuna dan mengadakan rapat kabinet terbatas di kapal perang. Pemerintah juga melakukan reposisi identitas geografis dengan mengganti nama bagian utara Laut China Selatan yang masuk wilayah ZEE Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Strategi diplomatik terus diupayakan melalui penguatan posisi Indonesia di forum internasional dan pengajuan nota diplomatik ke PBB, dan keterlibatan aktif dalam perundingan ASEAN-China terkait penyusunan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan.

Indonesia juga mulai menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk meningkatkan kapabilitas militer serta memperkuat posisi tawar secara geopolitik. Pendekatan multilapis yang mencakup diplomasi, pertahanan, hukum internasional, dan kerja sama regional menunjukkan bahwa Indonesia menempuh jalur damai namun tegas dalam menyikapi klaim sepihak China.

Namun hingga saat ini, ketegangan di wilayah Natuna belum sepenuhnya mereda, dan klaim China terus menjadi tantangan serius bagi kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang efektif, menyeluruh, dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada respons militer atau diplomatik, tetapi juga pada penguatan kehadiran ekonomi dan masyarakat lokal di wilayah perbatasan maritim. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hukum internasional, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas kawasan secara berkelanjutan.

### **3. Strategi Diplomasi Pemerintah Indonesia**

Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan menanggapi dinamika konflik Laut China Selatan, Indonesia memainkan peran strategis sebagai mediator yang netral dan kredibel. Meski bukan bagian dari negara pengklaim wilayah, Indonesia aktif mendorong terbentuknya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC), yang akhirnya ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh oleh negara-negara ASEAN dan China. DoC menjadi salah satu tonggak penting dalam diplomasi kawasan, karena berhasil menetapkan kesepakatan bersama untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama UNCLOS 1982, Total Allowable Catch (TAC), Five Principles of Peaceful Coexistence, dan kebebasan navigasi di perairan sengketa. Melalui kesepakatan ini pula, ASEAN dan China diharapkan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan menyepakati penyelesaian damai atas konflik yang ada. Namun, peran diplomasi Indonesia tidak berhenti pada upaya multilateral tersebut. Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi tantangan nyata di wilayah perairannya sendiri, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara yang termasuk dalam ZEE Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya intensitas pelanggaran oleh kapal-kapal nelayan China sejak 2005, Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah pertahanan yang lebih konkret (Paggaru, 2024). Salah satu respons signifikan muncul pada tahun 2016 ketika Presiden

Joko Widodo secara simbolis memimpin rapat terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol-383 di perairan Natuna, didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan perlunya memperkuat kehadiran militer di kawasan tersebut, termasuk meningkatkan patroli laut dan pengawasan oleh TNI serta Bakamla guna memastikan kedaulatan nasional tetap terjaga (Machmudi, 2024). Langkah Indonesia kemudian diperluas melalui pendekatan diplomasi militer yang dirancang tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan posisi tawar dalam upaya diplomasi. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia memperkuat kapabilitas militernya, khususnya di wilayah perairan, dengan tujuan pencegahan konflik bersenjata di kawasan LCS yang semakin kompleks. Pendekatan ini ternyata mendapat sambutan positif dari negara-negara di kawasan. Pada tahun 2018 dan 2019, Indonesia mendorong dilaksanakannya patroli bersama di kawasan LCS dengan negara-negara ASEAN, dan langkah tersebut bahkan mendapat respons terbuka dari China yang menyatakan kesediaannya untuk mengadakan latihan militer bersama di perairan lepas pantai timur China sebagai bentuk kerja sama maritim. Salah satu kebijakan strategis lainnya yang diambil Indonesia adalah penamaan wilayah LCS yang berada di ZEE Indonesia sebagai Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengurangi kebingungan dalam pengelolaan wilayah kontinen dan memberikan kejelasan hukum bagi aparat penegak hukum di laut. Penamaan ini dipandang sebagai bentuk afirmasi atas kedaulatan Indonesia terhadap wilayah maritimnya sendiri. Meski menimbulkan protes dari China, Indonesia tetap melanjutkan proses pendaftaran nama tersebut ke PBB, menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak maritimnya melalui jalur legal formal di tingkat internasional (Nugraha, 2021).

Tanggapan China terhadap langkah-langkah Indonesia menunjukkan adanya dualitas dalam hubungan bilateral kedua negara. Di satu sisi, melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pemerintah China mengakui adanya perbedaan perspektif antara kedua negara mengenai wilayah Natuna, namun menilai perbedaan itu tidak bersifat mendasar. China menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan isu tersebut melalui komunikasi diplomatik dan menjamin bahwa hubungan dengan Indonesia akan tetap dilandasi semangat strategis jangka panjang. Geng Shuang juga menekankan pentingnya peran kedua negara dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan LCS, dan berharap agar Indonesia tetap fokus pada hubungan bilateral dan regional secara konstruktif (Ratya, 2024). Dengan demikian, pendekatan Indonesia dalam menghadapi isu Laut China Selatan mencerminkan kombinasi dari diplomasi multilateral, penguatan pertahanan nasional, serta pengelolaan hubungan bilateral secara strategis. Indonesia tidak hanya mengedepankan prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya melalui pendekatan yang tegas namun terukur. Respons China yang relatif terbuka menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan nasional dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan kekuatan besar regional (Ilmi & Rosyidin, 2020).

### **Diplomasi Bilateral Dengan China**

Hubungan Indonesia-China berkembang pesat dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, maritim, teknologi, dan kesehatan. Namun, sengketa di Laut Natuna Utara menjadi tantangan utama, di mana China mengklaim wilayah dalam Nine Dash Line yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982. Meskipun ada ketegangan, kedua negara tetap berkomitmen menjaga hubungan baik, yang tercermin dalam Joint Statement pada November 2024. Pernyataan bersama tersebut menekankan

kerja sama maritim dan mencakup 14 poin, termasuk peningkatan kepercayaan politik, kerja sama maritim, dan kolaborasi keamanan regional. Hal ini menunjukkan upaya kedua negara untuk memisahkan isu sengketa dari kerja sama strategis, meskipun pelanggaran wilayah oleh kapal China masih memicu ketegangan. Namun, pendekatan pragmatis yang dibangun lewat kerja sama kelautan memberi peluang untuk dialog dan pengelolaan konflik secara damai.

### **Diplomasi Multilateral dengan ASEAN**

Indonesia juga memainkan peran aktif di ASEAN dalam merespons konflik Laut China Selatan. Meski bukan pihak pengklaim, posisi Indonesia dekat dengan perairan sengketa, sehingga mendorong keterlibatannya sebagai mediator netral. Indonesia mengedepankan hukum laut internasional dan aktif mendorong penyusunan Code of Conduct (CoC) di ASEAN. Diplomasi maritim dikombinasikan dengan diplomasi pertahanan, di mana TNI AL berperan sebagai penjaga kedaulatan sekaligus simbol diplomasi. Di sisi lain, solidaritas ASEAN menghadapi tantangan akibat perbedaan kepentingan antarnegara, ketergantungan ekonomi pada China, dan rivalitas global antara China dan AS. Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan kebijakan “pragmatic equidistance,” menjaga hubungan seimbang dengan dua kekuatan besar tanpa berpihak.

Indonesia terus mempromosikan kerja sama regional yang inklusif dan stabil melalui inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Namun, kepemimpinan Indonesia di ASEAN tetap menghadapi hambatan, terutama terkait fragmentasi internal. Meski demikian, pendekatan diplomatik Indonesia yang menggabungkan netralitas, multilateralisme, dan keterbukaan kerja sama menjadikannya sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik secara damai dan berkelanjutan.

## **4. Strategi Pertahanan dan Keamanan**

Laut Natuna Utara menjadi fokus strategis pertahanan maritim Indonesia karena klaim tumpang tindih dengan China. Sejak 2019 hingga 2024, TNI AL dan Bakamla memperkuat sinergi melalui patroli gabungan, pelatihan bersama, dan sistem komando terpadu untuk menghadapi pelanggaran kapal asing, seperti insiden coast guard China yang mengganggu eksplorasi PT Pertamina. Pengawasan diperkuat dengan teknologi seperti drone dan dukungan TNI AU, serta pelibatan masyarakat pesisir melalui relawan penjaga laut.

Pemerintah juga membangun infrastruktur dan pangkalan militer di Natuna sebagai bagian dari strategi pertahanan dan konektivitas nasional. Proyek jalan dan pelabuhan didanai ratusan miliar rupiah untuk mendukung ekonomi lokal dan mobilitas logistik. Sejak 2016, Natuna dikembangkan sebagai pusat kekuatan militer di perbatasan, dilengkapi dermaga, radar, dan skuadron udara. Pembangunan ini merupakan bagian dari pendekatan dual track strategy, menggabungkan pertahanan dan pembangunan sipil.

Namun, tantangan tetap ada: klaim China meningkatkan risiko konflik, pembangunan militer berpotensi menimbulkan persepsi provokatif, dan hambatan logistik di daerah terpencil menjadi kendala pembangunan infrastruktur. Strategi Indonesia harus menyeimbangkan kekuatan militer dan diplomasi, termasuk kerja sama dengan negara seperti AS dan Australia.

Indonesia juga aktif dalam latihan militer bilateral dan multilateral di Natuna, seperti Latma Joint Exercise dengan Singapura dan ASEX-01 dengan ASEAN. Latihan-latihan ini meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerja sama keamanan regional. Selain itu, patroli terpadu dan latihan gabungan dengan berbagai instansi memperlihatkan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman maritim secara komprehensif. Melalui modernisasi armada, penguatan SDM, dan kolaborasi regional, Indonesia menampilkan diri sebagai

kekuatan maritim yang siap menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Pendekatan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor utama di Asia Tenggara yang tegas dalam mempertahankan kedaulatan tanpa memicu eskalasi konflik.

<b>Tabel 4.2</b>					
<b>Latihan Militer dan Patroli Bersama di Natuna (2019–2024)</b>					
<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Nama Kegiatan / Keterangan</b>	<b>Mitra / Partisipan</b>	<b>Lokasi / Fokus Operasi</b>	<b>Sumber</b>
Juli 2020	Latihan Militer	<b>Gladi Tugas Tempur Tingkat-III:</b> 2.000 personel, 26 KRI, 17 pesawat.	Internal (TNI AL)	Laut Natuna	Elza Astari Retaduari (Detik News, Juli 2020), Rehia Sebayang (CNBC Indonesia, Juli 2020)
Maret 2024	Latihan Militer	<b>Kekah Gesit-24:</b> Simulasi keadaan darurat dan serangan di Lanud RSA.	Internal (TNI AU dan instansi sipil)	Lanud Raden Sadjad, Natuna	Raden Sadjad (TNI AU, Maret 2024)
Mei 2024	Patroli Bersama	<b>Latihan Ranjau</b>	TNI AL – Angkatan Laut Singapura	Laut Natuna	Pandu Wiyoga (Kompas, Mei 2024)
Juli 2024	Patroli Bersama	<b>Patroli Terkoordinasi Indonesia–Singapura</b>	TNI AL – Angkatan Laut Singapura	Zona Maritim Indonesia–Singapura	Genta Tenri Mawangi (Antara News, Juli 2024)
Agustus 2024	Latihan Militer	<b>Latihan Perang Maritim:</b> 2 kapal perang Indonesia, 2 dari Singapura. Fokus pada latihan penembakan.	TNI AL – Angkatan Laut Singapura	Laut Natuna	Indonesiadefense.com (Agustus 2024)
Desember 2024	Patroli Gabungan	<b>Patroli Terpadu:</b> Menggunakan kapal SAR KN Sasikirana,	TNI AU, Basarnas, Forkopimda	Perairan Natuna	Bimantara (Datakepri, Desember 2024)

		menjaga stabilitas saat libur akhir tahun.			
--	--	--	--	--	--

Latihan militer di Laut Natuna memperkuat klaim kedaulatan dan kesiapsiagaan pertahanan Indonesia, namun berpotensi memicu ketegangan dengan China yang mengklaim wilayah tersebut melalui Nine Dash Line. Aktivitas militer intensif ini juga mengganggu jalur pelayaran internasional, meningkatkan risiko maritim, serta mendorong naiknya biaya logistik dan asuransi kapal, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perdagangan dan ekspor-impor nasional. Selain itu, eksplorasi sumber daya energi di ZEE Natuna Utara terhambat oleh intimidasi dari militer asing. Meski demikian, latihan bersama dengan negara mitra seperti AS, Australia, Singapura, dan ASEAN memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan menolak klaim sepihak, sekaligus menunjukkan keseimbangan antara pendekatan militer dan diplomasi.

### 5. Strategi Diplomasi dan Strategi Pertahanan - Keamanan sebagai Solusi Menjaga Kedaulatan

Indonesia menerapkan dua pendekatan utama secara bersamaan dalam menjaga kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara, yakni melalui strategi diplomasi dan strategi pertahanan-keamanan. Kedua strategi ini digunakan secara komplementer untuk menanggapi tantangan geopolitik yang kompleks, khususnya terkait klaim sepihak China atas wilayah yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia melalui "Nine-Dash Line".

Dalam konteks diplomasi, Indonesia mengadopsi pendekatan diplomasi militer dan diplomasi maritim. Diplomasi militer diterapkan dengan menjadikan kekuatan militer sebagai alat diplomasi, seperti pelaksanaan latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara ASEAN. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapsiagaan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya, tetapi juga untuk membangun aliansi strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional.

Diplomasi maritim dijalankan dengan mengacu pada prinsip hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, guna menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian sah dari ZEE Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menolak klaim sepihak China, serta memperkuat legitimasi internasional terhadap posisi Indonesia. Dalam diplomasi bilateral, Indonesia juga berupaya menjaga stabilitas hubungan dengan China melalui kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial-budaya, hingga teknologi, sembari tetap menolak klaim teritorial yang melanggar kedaulatan Indonesia.

Di sisi lain, strategi pertahanan dan keamanan nasional dilakukan secara konkret melalui pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna, peningkatan patroli oleh TNI AL dan Bakamla, serta latihan militer yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespons secara langsung pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai (coast guard) China yang beberapa kali memasuki wilayah perairan Natuna secara ilegal. Keberadaan kekuatan militer ini juga menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi pelanggaran kedaulatan, serta siap menghadapi potensi konflik di kawasan tersebut.

Kedua strategi ini dilakukan secara sinergis mengingat situasi di Laut Natuna Utara tidak hanya menyangkut kedaulatan teritorial, tetapi juga berdampak pada aspek keamanan nasional, kestabilan ekonomi, serta posisi diplomatik Indonesia di kancah regional dan global. Peningkatan aktivitas militer dan latihan di kawasan ini, misalnya,

memberikan efek ganda: di satu sisi meningkatkan keamanan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan mengganggu jalur pelayaran serta perdagangan internasional. Tensi geopolitik yang meningkat juga menyebabkan naiknya premi asuransi kapal, biaya logistik, dan terhambatnya eksplorasi sumber daya alam seperti migas di wilayah ZEE Natuna.

Dalam diplomasi multilateral, Indonesia memainkan peran sentral di ASEAN, khususnya dalam menghadapi klaim China atas Laut China Selatan. Meskipun Indonesia aktif mendorong solidaritas dan kerja sama kawasan, namun tanggapan ASEAN sering terhambat oleh beragam kepentingan nasional, ketergantungan ekonomi terhadap China, serta tekanan geopolitik global. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan respons kolektif yang solid di tingkat regional.

Berdasarkan pengalaman dan data historis, strategi pertahanan dan keamanan dinilai lebih memberikan efek jangka pendek yang nyata dalam melindungi wilayah Natuna dari pelanggaran. Namun, strategi ini tetap perlu didukung oleh pendekatan diplomatik jangka panjang guna menjaga stabilitas hubungan internasional dan mencegah konflik terbuka. Kombinasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengambil posisi tegas, strategis, dan seimbang dalam menghadapi dinamika Laut Natuna Utara, menjaga kedaulatan, membangun kekuatan, tanpa melepaskan jalur-jalur diplomasi yang konstruktif.

## KESIMPULAN

Kebijakan Indonesia dalam menyelesaikan konflik klaim China atas Laut Natuna Utara dilakukan melalui diplomasi militer serta penguatan pertahanan dan keamanan. Kasus klaim *nine dash line* dari China membuat Indonesia perlu mempertahankan wilayah perairan Natuna yang masuk dalam klaim tersebut. Dari strategi diplomasi, Indonesia melakukan diplomasi bilateral dengan China dan diplomasi multilateral dengan ASEAN. Melalui diplomasi bilateral dengan China, dalam menjaga kepentingan nasional wilayah Laut Natuna Utara dan menjaga hubungan baik dengan China, Indonesia menyepakati *Joint Statement* atau pernyataan bersama yang difokuskan pada bidang maritim, isu yang selama ini menjadi titik panas dalam hubungan bilateral kedua negara. Diplomasi multilateral dengan ASEAN membuat Indonesia menjadi penengah terhadap kasus klaim *nine-dash line* yang membuat beberapa negara ASEAN juga dilewati oleh garis tersebut. Indonesia kerap mengaitkan agenda keamanan dengan tujuan-tujuan ekonomi, baik dalam konteks kerjasama intra-ASEAN maupun dengan mitra eksternal dalam diplomasi ASEAN. Strategi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang mampu menyeimbangkan dimensi keamanan dan pembangunan dalam satu kerangka kebijakan luar negeri. Indonesia juga mencoba menyelesaikan konflik dengan strategi pertahanan dan keamanan melalui militer dengan TNI AL dan Bakamla menjalin kerja sama sinergis dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah maritim Indonesia dan melalui pelatihan militer dengan negara lain, serta peletakan pangkalan TNI di wilayah Laut Natuna Utara. Melalui dua strategi tersebut, Indonesia dapat menjaga keutuhan Laut Natuna Utara dari klaim China, yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia dan menjadi kepentingan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk mempertahankan wilayahnya.

## REFERENSI

- A, Q. (2023). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diambil kembali dari gramedia.com: [https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#2\\_Sugiyono](https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/#2_Sugiyono)

- Agastia, I. G. B. D. (2020). Understanding Indonesia's role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A role theory approach. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 7(3), 293–305. <https://doi.org/10.1002/app5.308>
- Agusman, D. D. (2023). *Natuna Waters: Explaining a Flashpoint between Indonesia and China*. *Indonesian Journal of International Law*:(Vol. 20: No. 4, Article 4). [https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/4?utm\\_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fijil%2Fvol20%2Fiss4%2F4&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol20/iss4/4?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fijil%2Fvol20%2Fiss4%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages)
- Al Jazeera. (2023, Oktober 24). *Why does China claim almost the entire South China Sea?* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/24/why-does-china-claim-almost-the-entire-south-china-sea>
- Antara News Kepri. (2022, May 31). *KKP: Perpres No 41/2022 bermanfaat bagi Natuna*. Antara News Kepri. <https://kepri.antarane.ws.com/berita/119253/kkp-perpres-no-412022-bermanfaat-bagi-natuna>
- Anugerah, B. (2021). Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koresif Cina Di Laut Natuna Utara. 286-307.
- Bainus, A., Rachman, J.B. (2018). Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional, 2(2), 109-115.
- BBC News Indonesia. (2020). Kapal perang TNI AL usir kapal Penjaga Pantai China di perairan Natuna, China klaim zona ekonomi eksklusif. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>
- Caruana, A. (2025). *MAP Spotlight: Nine-Dash Line*. ICAS. <https://chinaus-icas.org/research/map-spotlight-nine-dash-line/>
- Domínguez, G. (2015). *China concerned at ASEAN chief's remarks – DW – 03/12/2015*. Dw.Com. <https://www.dw.com/en/asean-chiefs-comments-on-south-china-sea-raise-concerns-for-beijing/a-18309549>
- Gischa, S. (2020, Januari 4). Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia. Diambil kembali dari Kompas : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all>
- Habibie, S. Y. (2024, April 25). *South China Sea Conflict: Indonesia's Maritime Diplomacy*. Modern Diplomacy. <https://modern diplomacy.eu/2024/04/25/south-china-sea-conflict-indonesias-maritime-diplomacy/>
- Hastuti, R. K. (2020). *Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal Natuna*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protes-keras-klaim-china-soal-natuna>
- Ilmi, N., & Rosyidin, M. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. *Journal of International Relations Diponegoro*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i3.28335>
- Kantjai, M. (2019). KEWENANGAN TRIBUNAL INTERNASIONAL HUKUM LAUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELAUTAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982. *LEX PRIVATUM*, 7(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25874>
- Laksmiana, E. (2023). *Buck-passing from behind: Indonesia's foreign policy and the Indo-Pacific*. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/buck-passing-from-behind-indonesias-foreign-policy-and-the-indo-pacific/>
- Li, M. (2014). Mengelola Isu Keamanan di Laut China Selatan : Dari DOC ke COC. Diambil dari *Kyoto Review of Southeast Asia* : <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/#return-note-4570-1>
- Manek, B. G. A. (2023). Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i2.431>

- Mawangi, G. T. (2023, September 19). *Panglima TNI buka latihan militer ASEAN pertama ASEX-01 Natuna*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3733293/panglima-tni-buka-latihan-militer-asean-pertama-asex-01-natuna>
- Naila, R. A., & Nugraha, I. F. (2025). Strategi Indonesia dalam Menangani Kasus Illegal Fishing di Wilayah Perairan Natuna. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 21–35. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.384>
- Naqiyah, I. S. (2024). JOINT STATEMENT INDONESIA-CHINA: ANALISA DAMPAK KERJA SAMA PADA BIDANG MARITIM TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DI LAUT NATUNA UTARA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(11), Article 11. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i11.7895>
- Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W. W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14027>
- Patrio, Z. (2022). Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), Article 4.
- Prabowo, D., & Achmad, N. (2024, May 13). *2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/13/19382281/2-kapal-pemburu-ranjau-terbaru-tni-al-latihan-bersama-dengan-al-singapura>
- Pramudyani, Y. D. (2020, January 4). *Nota protes tunjukkan Indonesia tolak klaim China atas perairan Natuna*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1235631/nota-protes-tunjukkan-indonesia-tolak-klaim-china-atas-perairan-natuna>
- Presmedia. (2024, October 23). *Bakamla dan TNI AL Usir Kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara*. presmedia.id. <https://presmedia.id/bakamla-dan-tni-al-usir-kapal-coast-guard-china-di-laut-natuna-utara/>
- Ratya, M. P. (2024). *Sikap China di Natuna Jadi Tantangan Diplomasi Pertahanan RI-China*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7618251/sikap-china-di-natuna-jadi-tantangan-diplomasi-pertahanan-ri-china>
- Rubiolo, M. F. (2020). The South China Sea Dispute: A Reflection of Southeast Asia's Economic and Strategic Dilemmas (2009-2018)\*. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 15(2), 115–130.
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Utara Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. 67-75.
- Saputra, N. R., Ramadhan, F. A., & Susilo, A. R. (2024). Sengketa Wilayah Perairan Laut Natuna Antara Indonesia dan China Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 47–61. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.18427>
- SASTRA, Y. (2024, October 22). *Bakamla Usir Kapal China Coast Guard di Laut Natuna Utara*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/22/bakamla-usir-kapal-china-coast-guard-di-laut-natuna-utara>
- Septari B, N. A., Manullang, G. H., Azzahra S, A. F., Alvania M, B. G., Lumbantoruan, G. M. (2022). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara Di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Lemhannas RI*. 10(1). 10-18.

- Shukla, S. (2020, July 28). *What is nine-dash line? The basis of China's claim to sovereignty over South China Sea*. ThePrint. <https://theprint.in/theprint-essential/what-is-nine-dash-line-the-basis-of-chinas-claim-to-sovereignty-over-south-china-sea/469403/>
- Sidiq, M. H. F. (2022). *Cornerstone No More? The Changing Role of ASEAN in Indonesian Foreign Policy*. <https://thediplomat.com/2022/10/cornerstone-no-more-the-changing-role-of-asean-in-indonesian-foreign-policy/>
- Simangunsong, F., & Hutasoit, I. (2018). A Study of the development of Natuna Regency as a key site on Indonesia's Outer Border with particular regard to national defense and security issues in the South China Sea. *Journal of Marine and Island Cultures*, 7(2). <https://doi.org/10.21463/jmic.2018.07.2.04>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., Sari, M. I., (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Politica*. 84-101.
- Suseno, I. C. (2023). *Understanding China's Ambiguous Claim to Historic Rights in the 'Nine Dash Line' – PILS UNPAR*. <https://pils.unpar.ac.id/2023/06/22/understanding-chinas-ambiguous-claim-to-historic-rights-in-the-nine-dash-line/>
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*. 1-16.
- Vonny. (2024, December 25). *Patroli Terpadu di Laut Natuna Utara, Komandan Lanud RSA Pastikan Keamanan Nataru 2024/2025*. Bhayangkara Global News. <https://bhayangkaraglobalnews.com/patrolii-terpadu-di-laut-natuna-utara-komandan-lanud-rsa-pastikan-keamanan-nataru-2024-2025/>
- Wardah, F. (2019, December 31). *Langgar ZEE, Indonesia Sampaikan Nota Protes pada China*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/langgar-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sampaikan-nota-protes-pada-china/5225366.html>